

Makalah

GOOD GOVERNANCE: MEMBANGUN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS DAN NASIONALIS

Makalah disajikan pada
kegiatan “Peningkatan Wawasan Kebangsaan
bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pengurus Bakom-PKB,
tanggal 31 Oktober 2007, di Kabupaten Purwakarta.

Oleh

Pipin Hanapiah, Drs.
NIP. 131832050



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNPAD**

**BANDUNG
2007**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Mahaesa, makalah tentang “**Good Governance: Membangun Masyarakat yang Demokratis dan Nasionalis**” telah selesai dikembangkan dan disusun kembali.

Makalah ini pernah disajikan pada kegiatan “Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pengurus Bakom-PKB” tanggal 31 Oktober 2007 di Kabupaten Purwakarta. Makalah yang telah dikembangkan ini diajukan oleh penyusun untuk memenuhi kenaikan jabatan dan pangkat sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD) yang setara dengan Golongan IV/b.

Demikian makalah ini ditulis dan semoga dapat memenuhi ajuan dimaksud.

Bandung, 26 November 2007

Penyusun,

Pipin Hanapiah, Drs.

NIP. 131832050

GOOD GOVERNANCE: MEMBANGUN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS DAN NASIONALIS

Makalah disajikan pada
kegiatan “Peningkatan Wawasan Kebangsaan
bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pengurus Bakom-PKB,
tanggal 31 Oktober 2007, di Kabupaten Purwakarta.

Oleh

Pipin Hanapiah, Drs.
NIP. 131832050

Menyetujui:
Dosen Senior,

Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A.
NIP. 131408365

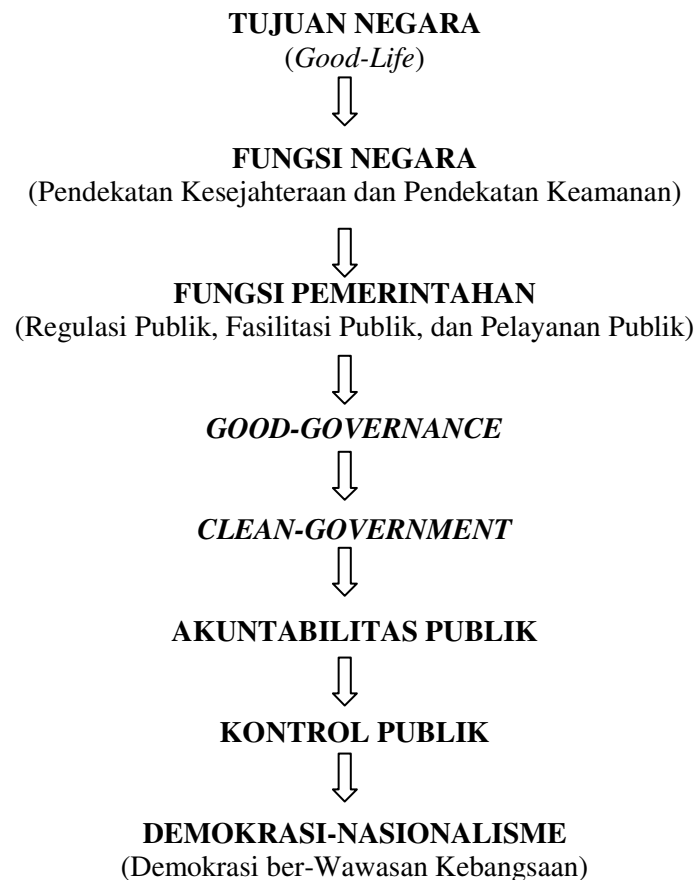
DAFTAR ISI

Persetujuan Dosen Senior	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian <i>Good Governance</i>	2
C. Rukun, Prinsip, dan Pilar <i>Good Governance</i>	3
D. Faktor Pengawal/Penjamin <i>Good Governance</i>	6
E. Akuntabilitas Publik dalam <i>Good Governance</i>	6
F. <i>Good Governance</i> , Akuntabilitas Publik, Demokrasi, dan Nasionalisme Indonesia	7
G. Daftar Pustaka	8

GOOD GOVERNANCE: MEMBANGUN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS DAN NASIONALIS*

Pipin Hanapiah**

A. Pendahuluan



-
- Makalah yang diperluas dari Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pengurus Bakom-PKB Kabupaten/Kota se-Bakorwil Priangan, Bogor, dan Purwasuka Tahun 2005 dan 2006 (oleh BKBPMMD Pemprov Jabar) untuk kegiatan serupa tanggal 14 Mei, 25 Juli, dan 31 Oktober 2007 di Kabupaten Purwakarta (oleh Bagkesbanglinmas Pemkab Purwakarta).

** Lektor Kepala dalam 'Metodologi Ilmu Politik/Pemerintahan' pada FISIP UNPAD, Bandung.

B. Pengertian *Good Governance*

→ Kata '*good*' pada *good-governance* bermakna:

- (1) *Berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.*
- (2) *Keberdayaan masyarakat dan swasta.*
- (3) *Pemerintahan yang bekerja sesuai dengan hukum-positif negara.*
- (4) *Pemerintahan yang produktif, efektif, dan efisien.*

→ Sementara '*governance*'-nya bermakna:

- (1) *penyelenggaraan pemerintahan.*
- (2) aktivitas pemerintahan melalui:
 - pengaturan publik
 - fasilitasi publik
 - pelayanan publik

→ → → *good governance* ---- '*penyelenggaraan pemerintahan yang baik*'.

terkandung **substansi nilai**:

- (a) bagaimana pemerintah memimpin negara dengan *bersih*?
- (b) bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri secara *mandiri*?

- (c) bagaimana pemerintah dan masyarakat menyelenggarakan pemerintahan secara *bertanggungjawab*?

C. Rukun, Prinsip, dan Pilar *Good Governance*

Rukun-rukunnya:

1. *Akuntabilitas*, pemerintah bertanggung-jawab, bertanggung-gugat, bertanggung-ganti, bertanggung-risiko, dan bertanggung-nista atas segala tindakan dan kebijakan yang dibuatnya.
2. *Transparansi*, pemerintah bersifat transparan kepada masyarakatnya.
3. *Keterbukaan*, terbuka bagi masyarakat untuk memberi tanggapan dan kritik terhadap pemerintah.
4. *Aturan hukum (rule of law)*, adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Prinsip-prinsipnya (UNDP, PBB):

1. *Partisipasi masyarakat* dalam pengambilan keputusan politik/negara.
2. *Daya tanggap pemerintah* terhadap setiap kepentingan masyarakat.
3. *Transparansi* dalam kerangka arus sistem informasi antara pemerintah dan publik, antarpublik, dan antarlembaga pemerintah.
4. *Berkeadilan*, tanpa diskriminasi, dalam kerangka pembiasaan kesetaraan publik.

5. *Efektivitas* kerja dan *efisiensi* sumber dan anggaran.
6. *Akuntabilitas publik* dalam kerangka pemeliharaan legitimasi pemerintah di mata publik.
7. **Kesetaraan publik** (egaliteisme).
8. **Pluralisme publik** (fraterniteisme).
9. **Kebebasan publik** (liberteisme).
10. Dan seterusnya.

Pilar-pilarnya:

(1) pemerintah

(2) masyarakat

(3) swasta

dengan fungsinya masing-masing:

Negara atau Pemerintah, berfungsi dalam hal:

1. regulasi/pembuatan kebijakan publik;
2. pengendalian dan pengawasan publik;
3. perlindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta;
4. fasilitasi kepentingan negara dan publik;
5. pelayanan kepentingan publik.

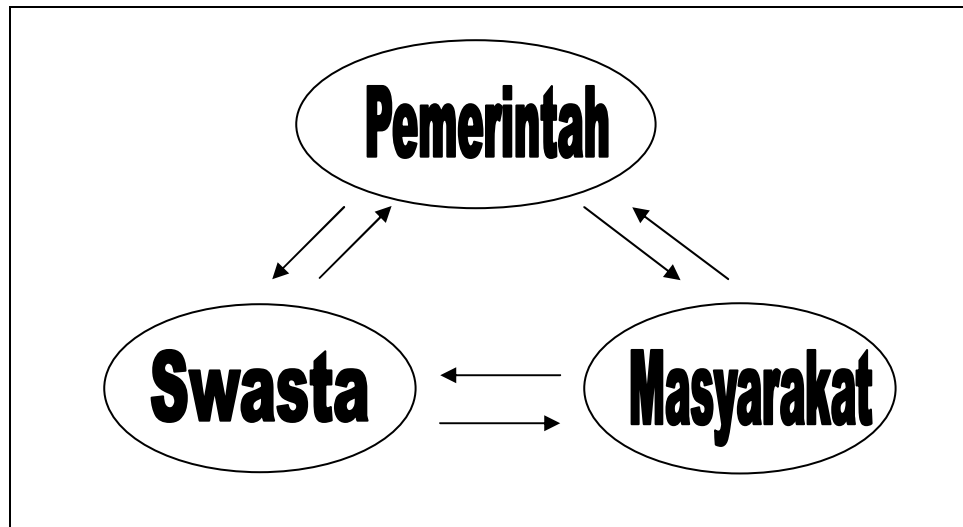
Swasta atau Dunia Usaha, berfungsi dalam hal:

1. penggerakan aktivitas bidang ekonomi;
2. penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa;
3. penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan;
4. penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Masyarakat, berfungsi dalam hal:

1. posisinya sebagai subjek sekaligus objek (partisipator) bagi penyelenggaraan urusan-urusan yang dilakukan oleh Negara/ Pemerintah dan Swasta;
2. pengontrol terhadap kinerja Pemerintah dan Swasta.

Hubungan kerjasama antar-ketiga pilar:



D. Faktor Pengawal/Penjamin Good Governance

1. Ideologi yang rasional.
2. Konstitusi yang modern.
3. Demokrasi yang konstitusional.
4. Pemilu yang bebas.
5. Multiparpol.
6. Legislatif yang representatif.
7. Eksekutif yang legitimatif.
8. Yudikatif yang merdeka.
9. Kontrol publik.
10. Kontrol internasional.
11. Kualitas SDM.

E. Akuntabilitas Publik dalam *Good Governance*

Bila *gogo* efektif, maka akuntabilitas publik akan optimal. Optimalisasi akuntabilitas publik dapat terwujud apabila hal-hal berikut diupayakan.

1. Pemerintah yang bersih (*clean governmet*).
2. Birokrasi yang netral/independen.
3. Penegak hukum yang adil dan mandiri.
4. Pers yang bebas dan bertanggungjawab.

5. LSM yang proporsional dan profesional.
6. Ormas yang fungsional.
7. Masyarakat yang menyatu, mandiri, dan partisipatif.
8. Swasta dan pengusaha yang sosialis.
9. Generasi muda yang berkualitas.
10. Terakhir tetapi yang terpenting adalah adanya *good-leadership for governing*.

F. *Good-Governance*, Akuntabilitas Publik, Demokrasi, dan Nasionalisme Indonesia

Good-governance **tanpa** *clean-government* → korup → korupsi;

Clean-government **tanpa** akuntabilitas-publik → kolus → kolusi;

Akuntabilitas-publik **tanpa** demokrasi → nepotis → nepotisme;

Demokrasi **tanpa** nasionalisme → buta → kebablasan.

bernegara → **berpolitik** → **permainan-kekuasaan**.



demokrasi → **pengaturan dan pembatasan** → **konstitusi (UUD)**.



ideologinya'?



nasionalisme
(faham-kebangsaan)

Indonesia



berkomitmen, berkonsekuen, dan berkonsisten terhadap:

Pembukaan UUD 1945;
Keutuhan NKRI;
Kebhinekatunggalikaan Nusantara;
serta
Keadaban Indonesia.

G. Daftar Pustaka

- Blondel, J.**, 1995, *Comparative Government: An Introduction* (Second Ed.), PrenticeHall H.W.: London.
- Chilcote, Ronald H.**, 1984, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm Reconsidered*, Westview Press: San Francisco.
- Dahl, Robert A.**, et. all, 2003, *The Democracy Sourcebook*, The MIT Press: London.
- Dunleavy, Patrick and Brendan O'Leary**, 1987, *Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy*, London: The MacMillan Press Ltd.
- Dworkin, Ronald**, 2002, *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality*, Harvard University Press: London.
- Gandhi, Madan G.**, 1984, *Modern Political Theory*, Oxford & IBH P.C.: N.D.
- Held, David**, 2004, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Polity Press: U.K.
- Johari, J.C.**, 1987, *Contemporary Political Theory* (Revised and Enlarged Ed.), S.K. Ghai: N.D.
- LAN-BPKP**, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: LANRI.
- Manan, Bagir**, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jogjakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UII.
- Osborne, David dan Ted Gaebler**, 1996, *Mewirauahakan Birokrasi*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Rapar, J.H.**, 2001, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Sartori, Giovanni**, 1997, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes* (2nd Ed.), New York University Press: N.Y.

Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.

Spiro, Herbert J., 1969, *Responsibility in Government: Theory and Practice (New Perspective in Political Science)*, Van Nostrand Reinhold Company: N.Y.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta: UI Press.

Setjen MPR-RI, 2002. *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendikia.

Vijayakusuma 2514, 31 Oktober 2007